p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman
JIPKIS
Vol. 4, No. 3, Desember, 2024 hal. 321-328
Journal Page is available to https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home

PERBEDAAN BATAS ATAS UANG KULIAH TUNGGAL ANTARA PTNBH DAN NON-PTNBH: STUDI EKSPLORATIF 20 PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA JALUR SNBP 2024

Supatmin[1], Endang Nurita[2]
[1,2]Universitas Pamulang
Email: dosen01767@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) memiliki otonomi keuangan yang lebih luas daripada PTN lain, sehingga muncul kekhawatiran bahwa uang kuliah tunggal (UKT) di PTNBH lebih tinggi. Bukti kuantitatif yang membandingkan kedua kelompok masih sulit ditemukan. **Tujuan:** Membandingkan besaran UKT kelompok tertinggi antara PTNBH dan non-PTNBH, dan memeriksa apakah letak di Pulau Jawa berkaitan dengan besaran tersebut. **Metode:** Studi eksploratif potong lintang pada 20 PTN dengan data UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024 yang dihimpun media dari laman resmi kampus. Status PTNBH tahun 2024 ditentukan dari daftar PTNBH yang dipublikasikan (16 PTNBH dan 4 non-PTNBH). Analisis memakai uji Welch, Mann–Whitney, uji permutasi, dan regresi OLS pada logaritma UKT dengan galat baku HC3. Portal PDDikti dan laman UKT resmi kampus tidak dapat diakses, sehingga data bersifat sekunder. **Hasil:** Rata-rata UKT tertinggi PTNBH Rp22,56 juta (SD 7,15) dan non-PTNBH Rp21,70 juta (SD 9,22). Perbedaannya tidak signifikan (Welch $p = 0{,}78$; Mann–Whitney $p = 1{,}00$; permutasi $p = 0{,}84$). Pada regresi, koefisien PTNBH adalah 0,089 ($p = 0{,}79$) tanpa kovariat dan −0,059 ($p = 0{,}85$) setelah mengontrol letak di Pulau Jawa. Dengan hanya empat PTN non-PTNBH, studi ini hanya dapat mendeteksi selisih sekitar 2,6 kali lipat. **Kesimpulan:** Pada sampel ini tidak ada bukti bahwa batas atas UKT PTNBH berbeda dari non-PTNBH, tetapi ketiadaan bukti itu bukan bukti ketiadaan perbedaan. Kesimpulan perlu diuji dengan data UKT per program studi dari seluruh PTN.

Kata kunci: uang kuliah tunggal; PTNBH; pembiayaan pendidikan tinggi; otonomi perguruan tinggi; berbagi biaya

ABSTRACT

Background: Indonesian state universities with legal-entity status (PTNBH) have broader financial autonomy than other state universities, raising concern that their single tuition fee (UKT) is higher. Quantitative comparisons remain scarce. **Objective:** To compare the highest UKT group between PTNBH and non-PTNBH universities and to check whether location on Java is associated with it. **Methods:** Exploratory cross-sectional study of 20 state universities using the highest UKT group for the 2024 SNBP admission track, compiled by news media from official campus websites. 2024 PTNBH status came from published lists (16 PTNBH, 4 others). Analysis used Welch and Mann–

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v4i3.279

Whitney tests, a permutation test, and OLS on log UKT with HC3 errors. The PDDikti portal and official campus UKT pages were inaccessible, so data are secondary. **Results:** Mean highest UKT was IDR 22.56 million for PTNBH (SD 7.15) and IDR 21.70 million for others (SD 9.22). The difference was not significant (Welch $p = 0.78$; Mann–Whitney $p = 1.00$; permutation $p = 0.84$). The PTNBH coefficient was 0.089 ($p = 0.79$) unadjusted and −0.059 ($p = 0.85$) adjusted for Java location. With only four non-PTNBH universities, the study could detect only about a 2.6-fold difference. **Conclusion:** This sample gives no evidence that PTNBH differ in the UKT ceiling, but absence of evidence is not evidence of absence. Program-level UKT data for all state universities are needed to test it.

Keywords: single tuition fee; legal-entity state university; higher education financing; university autonomy; cost sharing

PENDAHULUAN

Biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia dibayar mahasiswa dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT), yang dibagi ke dalam kelompok menurut kemampuan ekonomi keluarga. Batas bawah kelompok pertama dan kedua ditetapkan pemerintah sebesar Rp500 ribu dan Rp1 juta (Nancy, 2024), sedangkan batas atas ditentukan masing-masing kampus dalam kerangka standar satuan biaya operasional yang diatur Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Pada 2024, rencana kenaikan UKT memicu protes mahasiswa di sejumlah PTN, dan pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan UKT dan iuran pengembangan institusi tahun akademik 2024/2025 melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 (Yulianti, 2025).

Perdebatan itu sering dikaitkan dengan status PTNBH. PTNBH adalah PTN yang diberi otonomi akademik, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan yang lebih luas. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2010 (Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Jumlahnya terus bertambah: 21 PTN berstatus badan hukum pada 2022 (CNN Indonesia, 2022), Universitas Negeri Jakarta menyusul melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 (Times Indonesia, 2025), dan Universitas Udayana menerima Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2026 sehingga jumlahnya menjadi 25 (Swasty, 2026). Otonomi keuangan membuat PTNBH beralih dari pendanaan per pos anggaran ke pendanaan blok yang menuntut kinerja dan orientasi pasar (Ngo & Meek, 2019). Penelaah hukum mempertanyakan apakah kebijakan ini tetap menjamin pendidikan bermutu yang terjangkau, karena prinsip nirlaba dalam otonomi harus melindungi mahasiswa dari beban biaya yang tidak dapat ditanggung negara (Nurhanifah & Kusdarini, 2022).

Secara teoretis, ada alasan untuk mengharapkan UKT berbeda menurut status. Pembiayaan pendidikan tinggi di banyak negara bergeser dari pendanaan publik ke pembagian biaya antara pemerintah dan mahasiswa (Johnstone, 2004), dan pergeseran itu dapat berdampak pada akses bila tidak

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

disertai bantuan bagi mahasiswa kurang mampu (Barr, 2004). PTNBH yang diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara mungkin menetapkan UKT lebih tinggi untuk menutup biaya. Namun PTNBH juga dapat membiayai diri dari sumber lain, dan UKT mereka tetap berada dalam batas tarif nasional. Karena itu arah dan besar perbedaannya adalah pertanyaan empiris.

Studi yang membandingkan UKT antarkelompok PTN secara kuantitatif sulit ditemukan; sebagian besar kajian tentang PTNBH bersifat normatif atau kualitatif. Artikel ini mengisi sebagian celah itu dengan studi eksploratif. Tujuannya (1) membandingkan UKT kelompok tertinggi antara PTNBH dan non-PTNBH, dan (2) memeriksa apakah letak di Pulau Jawa berkaitan dengan besaran itu. Artikel ini tidak mengklaim menemukan determinan kausal. Data yang dapat diakses hanya mencakup satu ukuran UKT untuk 20 PTN, dan keterbatasan itu dijelaskan terbuka di bagian metode dan pembahasan.

METODE

Rancangan dan penyimpangan dari rancangan awal. Studi ini potong lintang eksploratif. Rancangan awal adalah regresi UKT per program studi pada PTN seluruh Indonesia dengan data dari laman UKT masing-masing PTN dan PDDikti. Portal PDDikti dan laman resmi kampus tidak dapat diakses dari lingkungan kerja penulis (permintaan ditolak oleh pembatas jaringan). Oleh karena itu, (a) data diambil dari laporan media yang mengutip laman resmi kampus, (b) unit analisis adalah PTN, bukan program studi, (c) variabel terikat adalah UKT kelompok tertinggi, bukan rata-rata UKT, dan (d) kovariat yang tersedia hanya letak di Pulau Jawa. Judul diubah dari "determinan besaran UKT" menjadi "perbedaan batas atas UKT" karena rancangan ini tidak dapat mengidentifikasi determinan.

Data. Variabel terikat adalah UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024 untuk 20 PTN, diambil dari tabel yang dihimpun Nancy (2024) dengan rujukan ke laman resmi masing-masing PTN dan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Program studi tidak dirinci; sumber hanya menyatakan bahwa UKT tertinggi umumnya dikenakan pada program seperti kedokteran. Satuan dalam sumber tidak dinyatakan eksplisit, dan UKT lazim dibayar per semester. Sebagai pemeriksaan konsistensi, UKT tertinggi program kedokteran 2024 dari Yulianti (2024) dibandingkan untuk 10 PTN yang muncul di kedua sumber. Status PTNBH tahun 2024 ditentukan dari daftar 21 PTNBH (CNN Indonesia, 2022) ditambah PTN yang ditetapkan sesudahnya (Times Indonesia, 2025; Swasty, 2026). Enam belas PTN dalam sampel berstatus PTNBH pada 2024 (UNS, ITS, UNY, ITB, IPB, UM, USK, UI, Unhas, Undip, Unair, Unnes, Unesa, UB, UGM, dan Unpad). Empat lainnya (Universitas Riau, Universitas Mulawarman, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Udayana) bukan PTNBH pada 2024: tiga yang pertama tidak ada dalam daftar 25 PTNBH per September 2026, dan Universitas Udayana baru ditetapkan pada 2026. Letak di Pulau Jawa dikodekan 1 untuk PTN yang berlokasi di Pulau Jawa dan 0 untuk lainnya (Tabel 1).

Tabel 1. Data UKT kelompok tertinggi, status PTNBH, dan letak 20 PTN

PTN	UKT tertinggi SNBP	Status 2024	Letak	UKT tertinggi kedokteran 2024,

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v4i3.279

	2024 (Rp juta)			**pembanding (Rp juta)**
UB	33,50	PTN BH	Jawa	24,0
UNNES	32,00	PTN BH	Jawa	32,0
UNESA	32,00	PTN BH	Jawa	
UNS	30,00	PTN BH	Jawa	30,0
UGM	30,00	PTN BH	Jawa	30,0
UNSOED	30,00	Non-PTN BH	Jawa	
UNAIR	25,00	PTN BH	Jawa	25,0
UNMUL	25,00	Non-PTN BH	Luar Jawa	
UNPAD	24,00	PTN BH	Jawa	24,0
UNUD	23,24	Non-PTN BH	Luar Jawa	23,2
UNDIP	22,00	PTN BH	Jawa	22,0
UNHAS	20,00	PTN BH	Luar Jawa	
UI	20,00	PTN BH	Jawa	20,0
USK	19,50	PTN BH	Luar Jawa	
UM	17,00	PTN BH	Jawa	25,5
IPB	15,00	PTN BH	Jawa	
ITB	14,50	PTN BH	Jawa	
UNY	14,00	PTN BH	Jawa	
ITS	12,50	PTN BH	Jawa	
UNRI	8,55	Non-PTN BH	Luar Jawa	

Catatan: UKT tertinggi dari Nancy (2024); pembanding kedokteran dari Yulianti (2024) dan tersedia untuk 10 PTN. Singkatan: UNS = Universitas Sebelas Maret; USK = Universitas Syiah Kuala.

Analisis. Karena sebaran UKT miring ke kanan dan jumlah non-PTNBH hanya empat, perbandingan utama memakai logaritma natural UKT. Peneliti menjalankan uji t Welch pada logaritma UKT, uji Mann–Whitney, dan uji permutasi dua arah untuk selisih rata-rata (20.000 pengacakan). Model regresi OLS memakai ln(UKT) sebagai variabel terikat, status PTNBH sebagai prediktor, dan letak di Pulau Jawa sebagai kovariat, dengan galat baku HC3 yang cocok untuk sampel kecil (Long & Ervin, 2000). Koefisien diterjemahkan ke selisih persentase melalui $\exp(b) - 1$. Daya studi dinilai dari galat baku koefisien PTNBH: selisih terkecil yang dapat dideteksi dengan daya 80% dan $\alpha = 0{,}05$ kira-kira 2,8 kali galat baku. Analisis sensitivitas mengganti UKT Universitas Jenderal Soedirman dengan Rp17 juta, angka dari sumber lain yang mengutip surat keputusan rektor 2024 (Dealls, tanpa tahun), dan mengeluarkan UB dan UM yang angka UKT-nya berbeda antar sumber. Semua analisis dijalankan dengan Python (statsmodels dan SciPy). Data dan skrip analisis tersedia pada berkas pendamping.

HASIL

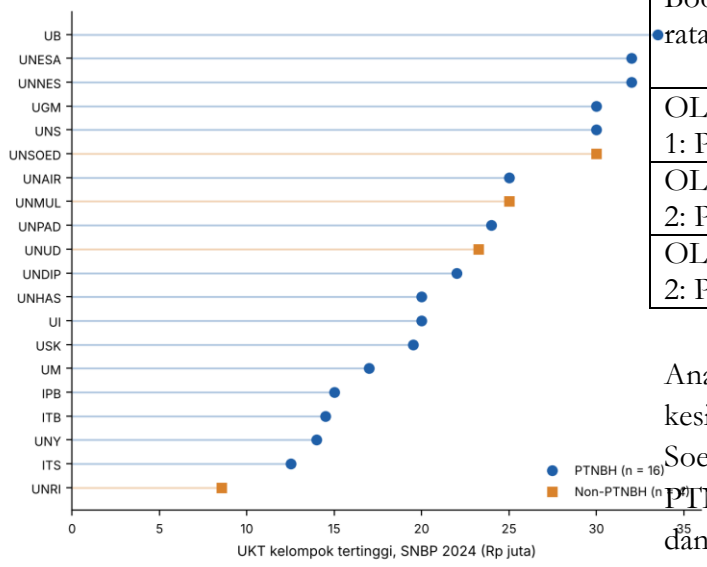
Tabel 2 meringkas UKT tertinggi menurut status. Rata-rata UKT tertinggi PTNBH (Rp22,56 juta) hampir sama dengan non-PTNBH (Rp21,70 juta), dan median non-

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

PTNBH (Rp24,12 juta) justru lebih tinggi daripada median PTNBH (Rp21,00 juta). Sebaran non-PTNBH lebih lebar karena memuat Universitas Riau (Rp8,55 juta) dan Universitas Jenderal Soedirman (Rp30 juta). Gambar 1 menunjukkan bahwa kedua kelompok saling tumpang tindih sepanjang rentang UKT.

Tabel 2. Statistik deskriptif UKT kelompok tertinggi menurut status PTNBH (Rp juta)

Kelompok	n	Rata-rata	SD	Median	Minimum	Maksimum
PTNBH	16	22,56	7,15	21,00	12,50	33,50
Non-PTNBH	4	21,70	9,22	24,12	8,55	30,00
Jawa	15	23,43	–	24,00	–	–
Luar Jawa	5	19,26	–	20,00	–	–



Gambar 1. UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024 pada 20 PTN menurut status PTNBH. Sumber: Nancy (2024), diolah.

Tabel 3 memuat hasil uji. Tidak ada uji yang menolak hipotesis nol bahwa kedua kelompok sama. Pada regresi tanpa kovariat, UKT tertinggi PTNBH 9,3% lebih tinggi daripada non-PTNBH (b = 0,089; galat baku 0,337; p = 0,79), dengan selang kepercayaan 95% dari 0,56 sampai 2,12 kali. Setelah mengontrol letak di Pulau Jawa, koefisien PTNBH berbalik menjadi −0,059 (galat baku 0,315; p = 0,85; selang 0,51 sampai 1,75 kali). Koefisien Pulau Jawa positif (b = 0,237; p = 0,28) tetapi tidak signifikan. Nilai R^2 hanya 0,010 untuk model pertama dan 0,064 untuk model kedua.

Tabel 3. Hasil uji perbedaan UKT tertinggi antara PTNBH dan non-PTNBH

Analisis	Estimasi	p
Uji t Welch pada ln(UKT)	t = 0,30; db = 3,5	0,78
Mann–Whitney (UKT)	U = 32,5	1,00
Uji permutasi, selisih rata-rata	Rp0,87 juta	0,84
Bootstrap, selisih rata-rata ln(UKT)	selang 95%: −0,32 sampai 0,65	–
OLS HC3, model 1: PTNBH	b = 0,089 (SE 0,337)	0,79
OLS HC3, model 2: PTNBH	b = −0,059 (SE 0,315)	0,85
OLS HC3, model 2: Pulau Jawa	b = 0,237 (SE 0,219)	0,28

Analisis sensitivitas tidak mengubah kesimpulan. Bila UKT Universitas Jenderal Soedirman diganti Rp17 juta, koefisien PTNBH menjadi 0,190 (p = 0,41). Bila UB dan UM dikeluarkan, koefisien menjadi −0,064 (p = 0,84). Pemeriksaan konsistensi dengan data kedokteran memperlihatkan bahwa angka kedua sumber sama (selisih

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v4i3.279

kurang dari Rp0,5 juta) pada 8 dari 10 PTN. Dua PTN berbeda: UB (Rp33,5 juta berbanding Rp24 juta) dan UM (Rp17 juta berbanding Rp25,5 juta). Korelasi Spearman antara kedua ukuran 0,56 ($p = 0,09$, $n = 10$). Hanya satu non-PTNBH (Universitas Udayana) yang ada pada pembanding, sehingga pembanding ini tidak dapat dipakai untuk membandingkan status.

PEMBAHASAN

Temuan utama adalah tidak adanya selisih yang dapat dibedakan dari nol antara batas atas UKT PTNBH dan non-PTNBH pada sampel ini. Hasil ini tidak sesuai dengan kekhawatiran bahwa otonomi keuangan PTNBH otomatis membawa UKT yang lebih tinggi (Nurhanifah & Kusdarini, 2022). Salah satu penjelasan yang masuk akal, tetapi tidak diuji di sini, adalah bahwa UKT semua PTN berada di bawah kerangka tarif nasional yang sama, sehingga batas atasnya ditentukan terutama oleh mahalnya program tertentu seperti kedokteran, bukan oleh status kelembagaan. Dukungan tidak langsung berasal dari catatan sumber data bahwa UKT tertinggi umumnya jatuh pada program kedokteran dan sejenisnya (Nancy, 2024; Yulianti, 2024). Penjelasan kedua adalah bahwa PTNBH membiayai diri dari sumber di luar UKT, seperti kerja sama, riset, dan dana abadi, sehingga tekanan menaikkan UKT berkurang. Studi ini tidak mengukur sumber pendapatan, jadi kedua penjelasan masih berupa dugaan.

Hasil tersebut harus dibaca dengan hati-hati karena beberapa alasan. Pertama, daya studi sangat rendah. Dengan hanya empat non-PTNBH, selisih yang dapat dideteksi dengan wajar sekitar 2,6 kali lipat, jauh lebih besar daripada perbedaan yang biasa diperdebatkan. Selang kepercayaan 95% model pertama (0,56 sampai 2,12 kali) mencakup selisih yang besar ke kedua arah. Kedua, UKT tertinggi hanya mewakili ujung distribusi dan satu program yang tidak diketahui, bukan rata-rata biaya yang ditanggung mahasiswa. Perbedaan status bisa saja muncul pada UKT median, pada jumlah mahasiswa di kelompok tinggi, atau pada iuran pengembangan institusi dan jalur mandiri, yang tidak termasuk di sini. Ketiga, data bersifat sekunder dan tidak seragam. Pemeriksaan kedokteran menunjukkan dua dari sepuluh PTN dengan angka berbeda jauh antar sumber, dan angka UKT 2024 bisa mencerminkan nilai sebelum pembatalan kenaikan oleh pemerintah (Yulianti, 2025). Keempat, sampel dipilih dari tabel media dan bukan acak, sehingga PTN yang mendapat liputan lebih besar cenderung PTN besar dan terkenal.

Kovariat juga terbatas. Letak di Pulau Jawa nyaris berimpit dengan status: 14 dari 16 PTNBH berada di Jawa, sedangkan tiga dari empat non-PTNBH berada di luar Jawa. Karena itu koefisien kedua variabel sulit dipisahkan, dan perubahan tanda koefisien PTNBH setelah kontrol Jawa tidak boleh ditafsirkan. Faktor lain yang secara teori memengaruhi UKT, seperti rasio dosen per mahasiswa, akreditasi, jumlah program ber-UKT tinggi, dan pendapatan daerah (Johnstone, 2004), tidak tersedia dalam sampel. Memasukkan faktor itu memerlukan data PDDikti dan laporan kampus yang tidak dapat diakses.

Implikasi kebijakan yang aman adalah terbatas. Hasil ini tidak membuktikan bahwa

p-ISSN 2809-2732
e-ISSN 2809-2554

PTNBH tidak menaikkan UKT, tetapi juga tidak mendukung klaim bahwa batas atas UKT PTNBH lebih tinggi. Untuk menguji klaim itu diperlukan data UKT per program studi dan per kelompok untuk semua PTN selama beberapa tahun, termasuk iuran pengembangan institusi, dengan desain beda-dalam-beda yang memanfaatkan tahun perubahan status (misalnya PTN yang menjadi PTNBH pada 2022, 2024, dan 2026). Kemendikbudristek dan PDDikti memiliki data itu, dan pembukaan data UKT dalam format terstruktur akan membuat pertanyaan ini dapat dijawab secara terbuka.

KESIMPULAN

Pada 20 PTN dengan data UKT kelompok tertinggi jalur SNBP 2024, rata-rata UKT PTNBH (Rp22,56 juta) hampir sama dengan non-PTNBH (Rp21,70 juta), dan tidak ada uji yang menunjukkan perbedaan signifikan. Hasil ini tidak berubah setelah mengontrol letak di Pulau Jawa atau dalam analisis sensitivitas. Namun, studi ini hanya memiliki empat non-PTNBH, memakai data sekunder, dan hanya mengukur batas atas UKT, sehingga tidak dapat menolak adanya perbedaan yang moderat. Artikel ini sebaiknya dibaca sebagai studi pendahuluan. Langkah berikutnya adalah mengulang analisis dengan data UKT per program studi dari laman resmi seluruh PTN dan PDDikti, serta menambahkan kovariat kelembagaan.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang dianalisis (UKT tertinggi per PTN, status PTNBH, letak, dan pembanding kedokteran) tersedia pada berkas pendamping ukt_tertinggi_ptn_2024.csv. Sumber primer yang menjadi rujukan angka tersebut adalah laman UKT resmi masing-masing PTN, yang tidak dapat diakses penulis dan perlu diverifikasi ulang sebelum naskah dikirim.

REFERENSI

Barr, N. (2004). Higher education funding. Oxford Review of Economic Policy, 20(2), 264–283. https://doi.org/10.1093/oxrep/grh015

CNN Indonesia. (2022, 28 Oktober). Daftar 21 kampus PTN-BH di Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221028090458-561-866429/daftar-21-kampus-ptn-bh-di-indonesia

Dealls. (tanpa tahun). UKT dan biaya kuliah Unsoed. https://dealls.com/pengembangan-karir/ukt-unsoed

Johnstone, D. B. (2004). The economics and politics of cost sharing in higher education: Comparative perspectives. Economics of Education Review, 23(4), 403–410. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2003.09.004

Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. The American Statistician, 54(3), 217–224. https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549

Nancy, Y. (2024). Berapa biaya UKT terendah dan tertinggi tahun 2024? Tirto.id. https://tirto.id/berapa-biaya-ukt-terendah-dan-tertinggi-tahun-2024-gYVc

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipkis.v4i3.279

Ngo, J., & Meek, V. L. (2019). Higher education governance and reforms in Indonesia: Are the matrices of autonomy appropriate? Journal of International and Comparative Education, 8(1), 17–26. https://doi.org/10.14425/jice.2019.8.1.17

Nurhanifah, I., & Kusdarini, E. (2022). The policy of legal-entity state higher education institutions (PTN-BH) determination viewed from material law institutions. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 3(1), 77–89. https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31004

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). https://peraturan.go.id/files/permendikbudristek-no-2-tahun-2024.pdf

Swasty, R. (2026, 15 September). 25 kampus negeri berstatus PTN-BH dan akreditasinya, Unud resmi join! Medcom.id. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/PNg123Rk-25-kampus-negeri-berstatus-ptn-bh-dan-akreditasinya-unud-resmi-join

Times Indonesia. (2025, 14 Agustus). UNJ peringati 1 tahun status PTNBH. https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/550283/unj-peringati-1-tahun-status-ptnbh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).

Yulianti, C. (2024, 22 Mei). Besaran UKT kedokteran di berbagai PTN tahun 2024, kampus mana UKT tertinggi? detikEdu. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7353631/besaran-ukt-kedokteran-di-berbagai-ptn-tahun-2024-kampus-mana-ukt-tertinggi

Yulianti, C. (2025, 5 Maret). Besaran UKT UI untuk jalur SNBP dan SNBT, cek prodi tujuanmu. detikEdu. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7807695/besaran-ukt-ui-untuk-jalur-snbp-dan-snbt-cek-prodi-tujuanmu